

ANALISIS DETERMINAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DI INDONESIA

PENELITI :

Citra Indah Merina S.E., Ak., M.M.

&

Andrian Noviardy S.E., M.Si.

RINGKASAN

Aktivitas produksi sebagai aktivitas utama perusahaan tidak hanya menciptakan berbagai manfaat seperti mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar seperti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kasus-kasus yang terjadi di PT Freeport Indonesia dan PT Newmont merupakan contoh dampak negatif yang disebabkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga melakukan eksploitasi sumber daya alam dan manusia (sosial) dengan tidak terkendali.

Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup tenteram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Meski demikian, tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah.

Berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai determinan pengungkapan CSR perusahaan *go public* di Indonesia dengan menggunakan standar pengungkapan CSR yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI). Adapun determinan pengungkapan CSR yang digunakan adalah kinerja lingkungan, profitabilitas, *financial leverage*, dan ukuran perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kinerja lingkungan, profitabilitas, *financial leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan *go public* di Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan suatu pemahaman yang realistis tentang pengaruh dari kinerja lingkungan, profitabilitas, *financial leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan *go public* di Indonesia.

Proksi yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan ialah peringkat PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu *Return on Asset* (ROA). Proksi yang

digunakan untuk mengukur *financial leverage* yaitu rasio hutang atas ekuitas. Proksi yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu total aktiva yang dimiliki perusahaan. Sementara itu, untuk mengukur pengungkapan CSR digunakan Indeks Pengungkapan Sosial yang merupakan luas pengungkapan relatif setiap perusahaan atas pengungkapan sosial yang dilakukannya, dimana instrumen pengukuran yang akan digunakan terdiri dari 79 item pengungkapan yang mengacu pada indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*). Pendekatan untuk menghitung CSDI menggunakan *content analysis* dalam mengukur *variety* dari CSDI.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *go public* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dengan melakukan pengujian regresi linear berganda.

Kata Kunci: *pengungkapan Corporate Social Responsibility, kinerja lingkungan, profitabilitas, financial leverage, ukuran perusahaan.*

BAB 1

PENDAHULUAN

Tujuan utama setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar maka perusahaan harus mampu menjalankan aktivitas produksi secara efisien dan efektif. Aktivitas produksi sebagai aktivitas utama perusahaan telah menciptakan berbagai manfaat seperti mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun aktivitas produksi juga dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar seperti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kasus-kasus yang terjadi di PT Freeport Indonesia dan PT Newmont merupakan contoh dampak negatif yang disebabkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga melakukan eksploitasi sumber daya alam dan manusia (sosial) dengan tidak terkendali.

Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Adanya informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1: Informasi atau fakta material adalah informasi

atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek, dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tuntutan agar perusahaan memberikan informasi yang transparan, akuntabel dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup tenteram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews, 1985 dalam Sembiring, 2005).

Menurut Gray *et. al.* (1987), tumbuhnya kesadaran publik akan peran perusahaan di tengah masyarakat melahirkan kritik karena menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat *safety* produk, serta hak dan status tenaga kerja. Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Perusahaan dihimbau untuk bertanggung jawab terhadap pihak yang lebih luas daripada kelompok pemegang saham dan kreditur saja.

Sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat kepada perusahaan yang semakin besar maka pada tahun 1970-an muncul konsep akuntansi baru yang disebut Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (*Social Responsibility Accounting*) yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan perusahaan dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Dalam akuntansi konvensional, pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders* dan *bondholders* sementara pihak yang lain sering diabaikan dengan alasan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non reciprocal* yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik. Di dalam SRA perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap

pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Pengimplementasian SRA pada perusahaan disebut juga tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Owen (2005) mengatakan bahwa kasus Enron di Amerika telah menyebabkan perusahaan-perusahaan lebih memberikan perhatian yang besar terhadap pelaporan sustainabilitas dan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Isu-isu yang berkaitan dengan reputasi, manajemen risiko dan keunggulan kompetitif nampak menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi sosial.

Meskipun fenomena pengungkapan tanggung jawab sosial ini telah muncul lebih dari dua dekade namun penelitian tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial sepertinya terpusat di Amerika Serikat, *United Kingdom*, dan Australia (Hackston dan Milne, 1996). Hanya sedikit penelitian yang dilakukan di negara lain seperti Kanada, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Malaysia, Indonesia dan Singapura. Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan keanekaragaman hasil. Hubungan antara *leverage* dan pengungkapan sosial juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Jika dihubungkan dengan regulasi, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dijabarkan lebih jauh dalam Peraturan Menteri BUMN No. 4 Tahun 2007. Meski demikian, tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah terlebih belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR sehingga masing-masing perusahaan menafsirkan sendiri bagaimana format pelaporan CSR.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh mengenai determinan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan go public di Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam proses pelaporan keuangan tahunan perusahaan, pengungkapan (*disclosure*) merupakan aspek pelaporan yang kualitatif, yang sangat diperlukan pemakai informasi laporan keuangan. Oleh karena sifatnya yang kualitatif, format pengungkapan tidak terstruktur, yang dapat terjadi secara langsung dalam laporan keuangan tahunan perusahaan melalui penjudulan yang tepat, catatan atas laporan keuangan ataupun berbagai sisipan seperti catatan kaki.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan) di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham.

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah satunya melalui *pengungkapan*

sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan. Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2004, paragraf kesembilan : “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diuraikan dalam laporan tahunan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi apabila laporan tahunan tersebut dilengkapi dengan pengungkapan sosial yang memadai. Memberikan informasi yang memadai diharapkan akan dapat berguna bagi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi CSR secara sukarela telah diteliti dalam penelitian sebelumnya, diantaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor (Deegan dan Blomquist, 2001; Hasnas, 1998; Patten, 1992; dalam Basamalah et al, 2005).

Berikut kerangka pemikiran dalam perumusan hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini:

1. Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan CSR

Kinerja lingkungan perusahaan menurut Suratno dkk (2006) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan perusahaan dapat diukur melalui PROPER. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Melalui PROPER, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) mengukur kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, kemudian melaporkan hasilnya melalui konferensi pers maupun internet dalam bentuk laporan warna yang diberikan. PROPER diumumkan secara rutin kepada masyarakat sehingga perusahaan yang dinilai akan memperoleh insentif maupun disinsentif reputasi, tergantung pada tingkat ketaatannya. Peringkat kinerja penataan perusahaan PROPER

dikelompokkan dalam lima peringkat warna. Masing-masing peringkat warna mencerminkan kinerja perusahaan. Kinerja penataan terbaik dilambangkan dengan warna emas, dan hijau, selanjutnya biru, merah dan kinerja yang paling buruk dilambangkan dengan warna hitam. Melalui pemeringkatan warna ini masyarakat akan lebih mudah memahami kinerja penataan masing-masing perusahaan.

Penelitian empiris mengenai kinerja lingkungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan hasil yang beragam. Hughes, *et al.* (2001) mengamati bahwa pelaku lingkungan di Amerika Serikat yang lebih buruk cenderung untuk membuat pengungkapan yang banyak, konsisten dengan tanggung jawab mereka untuk melaporkan kewajiban bersyarat menurut *Statement of Financial Accounting Standards / SFAS No. 5* tentang *Accounting for Contingencies* (FASB, 1975). Hubungan yang negatif antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan sosial ini nampak tidak konsisten dengan model *discretionary disclosure* menurut Verrecchia (1983) yang menyatakan bahwa pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan kinerja mereka berarti menggambarkan *good news* bagi pelaku pasar. Oleh karena itu, perusahaan dengan kinerja lingkungan (*environmental performance*) yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih buruk. Rakhiemah dan Agustia (2009) berpendapat bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *CSR disclosure*. Hal ini sejalan dengan penelitian Suratno dkk. (2006) yang menyatakan bahwa *environmental performance* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *environmental disclosure*. Oleh karena itu, hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Diduga terdapat pengaruh positif antara kinerja lingkungan dan pengungkapan CSR

2. Profitabilitas dan Pengungkapan CSR

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham [Heinze (1976) dalam Hackston & Milne (1996)], sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne (1996)]. Hackston & Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*. Vence (1975) dalam Belkaoui & Karpik (1989)

mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.

Penelitian ilmiah terhadap hubungan profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memperlihatkan hasil yang sangat beragam. Secara teoritis, menurut Kokubu *et. al* (2001) terdapat hubungan positif antara kinerja ekonomi suatu perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi dengan premis bahwa perolehan laba yang semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas. Akan tetapi Donovan dan Gibson (2000) menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis yang kedua dalam penelitian ini :

H2: Diduga terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dan pengungkapan CSR

3. *Financial Leverage* dan Pengungkapan CSR

Financial Leverage mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Perusahaan yang menggunakan hutang adalah perusahaan yang mempunyai *financial leverage*. Semakin besar proporsi hutang yang dipergunakan, semakin besar *financial leverage*-nya. Apabila perusahaan menggunakan hutang semakin banyak, maka akan semakin besar beban tetap yang muncul yaitu beban bunga hutang.

Perjanjian terbatas seperti perjanjian hutang yang tergambar dalam tingkat *leverage* dimaksudkan membatasi kemampuan manajemen untuk menciptakan transfer kekayaan antar pemegang saham dan pemegang obligasi (Jensen dan Meckling, 1976; Smith dan Warner, 1979 dalam Belkaoui dan Karpik, 1989). Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*. Hasil

penelitiannya menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper (1981) dalam Marwata (2001) dan Meek, et al (1995) dalam Fitriany (2001)] Oleh karena itu perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :

H3: Diduga terdapat pengaruh positif antara *financial leverage* dan pengungkapan CSR

4. Ukuran Perusahaan (*Size*) dan Pengungkapan CSR

Pengaruh hubungan ukuran perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*). Dalam hubungan keagenan yang terjadi antara prinsipal dan manajemen telah membebani manajer untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelolanya. Semakin besar sumber daya yang dikelola perusahaan maka semakin besar pula aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibanding perusahaan kecil sebagai upaya mengurangi biaya keagenan (Jensen and Meckling, 1976).

Selain itu berdasarkan argumen *political cost*, perusahaan besar cenderung menarik perhatian publik dan pemerintah untuk melakukan berbagai regulasi yang dapat memaksa perusahaan besar untuk mematuhi. Teori *political cost* ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Lang dan Lundholm (1993) yang menyatakan bahwa tingkat keluasan informasi dalam kebijakan pengungkapan perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran kecil sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ialah :

H4: Diduga terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kinerja lingkungan, profitabilitas, *financial leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan *go public* di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan suatu pemahaman yang realistis tentang pengaruh dari kinerja lingkungan, profitabilitas, *financial leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan *go public* di Indonesia serta dapat digunakan baik oleh investor maupun calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi di pasar modal.

BAB 4

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah : (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan sahamnya aktif diperdagangkan selama periode 2011-2012, (2) Perusahaan tersebut telah mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), (3) Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan periode 2011-2012 serta menyerahkan laporan tahunannya tersebut kepada BAPEPAM dan telah mempublikasikannya berturut-turut, dan (4) Informasi pengungkapan sosial diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan selama periode 2011-2012.

2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.1. Variabel Independen

a. Peringkat PROPER (RANK)

Kinerja lingkungan perusahaan (*environmental performance*) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan ini diukur dari prestasi perusahaan mengikuti program PROPER yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Sistem peringkat kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam lima (5) warna. Kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan memberi skor untuk masing-masing warna, yaitu :

Emas	: Sangat sangat baik;	skor	= 5
Hijau	: Sangat baik;	skor	= 4
Biru	: Baik;	skor	= 3
Merah	: Buruk;	skor	= 2
Hitam	: Sangat buruk;	skor	= 1

b. Profitabilitas (ROA)

Return on Asset (ROA) digunakan sebagai proksi dari profitabilitas. ROA diperoleh dengan cara membagi total laba bersih perusahaan dengan total aktiva.

c. *Financial Leverage* (LEV)

Financial Leverage diukur dengan rasio hutang / ekuitas.

d. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *logaritma natural* dari total aktiva yang dimiliki perusahaan.

1.2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah pengungkapan CSR, yaitu pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Untuk mengukur *social disclosure* ini digunakan CSDI (*Corporate Social Disclosure Index*) yang merupakan luas pengungkapan relatif setiap perusahaan sampel atas pengungkapan sosial yang dilakukannya, dimana instrumen pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 79 item pengungkapan (mengacu pada indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*) yang diperoleh dari website www.globalreporting.org

Pendekatan untuk menghitung CSDI menggunakan *content analysis* dalam mengukur *variety* dari CSDI. Pendekatan ini menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item tanggung jawab sosial dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa et al., 2005 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSDI adalah sebagai berikut :

$$CSDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan :

$CSDI_j$ = *Corporate Social Disclosure Index* perusahaan j

n_j = jumlah item yang harus diungkapkan, $n_j = 79$

X_{ij} = jumlah item yang diungkapkan : 1 = jika item i diungkapkan;

0 = jika item i tidak diungkapkan

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari variabel yang diamati dan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan persamaan regresi.

3. Model Pengujian Hipotesis

Analisis regresi bertujuan untuk mencari adanya hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Model pengujian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

$$CSDI = \alpha + \beta_1 RANK + \beta_2 ROA + \beta_3 LEV + \beta_4 Size + \varepsilon$$

Dimana :

CSDI = Jumlah informasi sosial yang diungkapkan

RANK = Peringkat PROPER

ROA = *Return on Asset*

LEV = *Financial Leverage*

SIZE = Ukuran Perusahaan

α = Koefisien konstanta

$$\beta_{1-4} = \text{Koefisien regresi variabel independen}$$

$$\varepsilon = \text{error term}$$

4. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum meregresi data dan melihat hubungan antar variabel maka perlu dilakukan uji asumsi klasik regresi terlebih dahulu agar model regresi dapat menghasilkan penduga yang tidak bias (sahih). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, otokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

Uji gejala multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai r^2 (*correlation matrix of coefficient*) dari hasil regresi antar variabel bebas pada model dan membandingkan dengan koefisien determinasi (R^2) pada awal modelnya. Apabila r^2 lebih besar atau sama dengan R^2 , maka tingkat multikolinearitas yang terjadi cukup tinggi sehingga memahayakan interpretasi hasil. Apabila r^2 lebih kecil dari R^2 maka tingkat multikolinearitas yang terjadi cukup kecil sehingga tidak mengganggu interpretasi hasil (Firdaus, 2004). Uji multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai VIF dari hasil regresi dengan batasan toleransi dibawah angka lima maka dapat dikatakan bahwa model bebas dari gejala multikolinearitas (Santosa, 2002).

Uji autokolerasi dapat dilakukan dengan nilai d Durbin-Watson. Menurut Gujarati jika nilai d diantara 2 dan $4-2$ maka tidak ada autokolerasi dalam model akan tetapi jika $d > 4-2$ maka terjadi autokolerasi (Gujarati, 1978).

Untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel terikat dilakukan dengan uji t dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} lebih kecil t_{hitung} maka variabel bebas tidak signifikan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Signifikansi pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat diuji dengan menggunakan uji F . Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Firdaus, 2004).

BAB 5

HASIL YANG DICAPAI

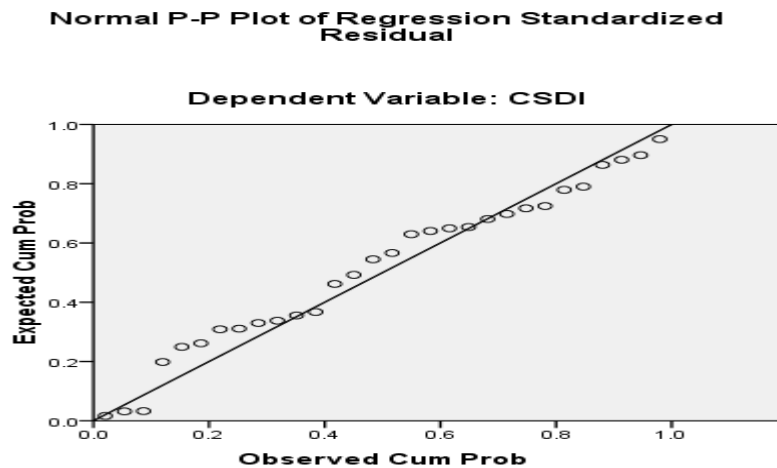
1. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis statistik terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan analisis yang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi agar analisis regresi dapat dilakukan, baik untuk keperluan prediksi maupun untuk pengujian hipotesis yaitu uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Data yang berdistribusi normal dalam suatu model regresi dapat dilihat pada grafik normal plot, dimana bila titik – titik yang menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas untuk variabel-variabel penelitian dapat diuraikan dibawah ini:



Gambar 5.1
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar yang diperoleh dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

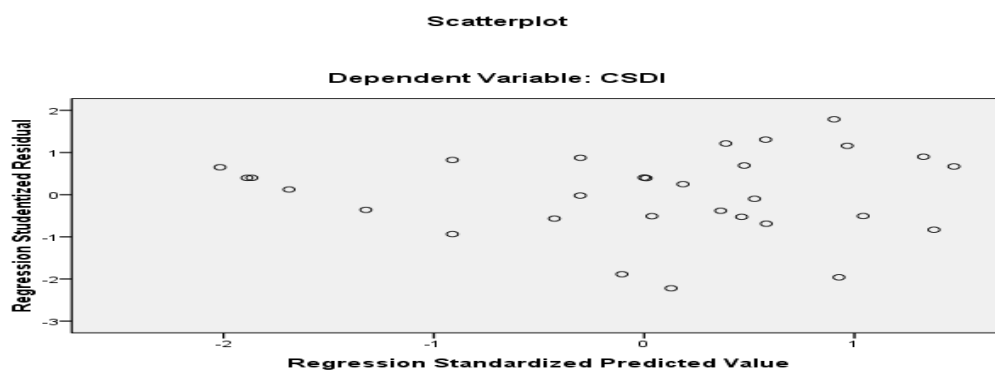
Multikolinearitas adalah keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) yang erat satu sama lain. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat digunakan untuk menentukan adanya problem multikolinearitas dalam suatu persamaan regresi (Gujarati, 1995). Dalam penelitian ini, *Tolerance Value* dan VIF digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kedua ukuran ini menunjukkan variabel bebas mana yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Regresi yang bebas multikolinearitas ditandai dengan nilai VIF berkisar angka 1 ($VIF = 1/\text{toleransi}$) dan nilai toleransi berkisar angka 1.

Hasil uji multikolinearitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini adalah nilai VIF untuk variabel-variabel independen bernilai sekitar 1. Begitu pula nilai toleransi juga berkisar pada nilai 1. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah di dalam model terjadi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara ZPRED dan SRESID. Jika ada suatu pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

Dilihat dari Gambar 5.2, grafik plot yang terlihat bahwa sebaran titik-titik relatif acak, menyebar, tidak terlihat titik memencil, dan tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dari model tersebut.



Gambar 5.2
Uji Heteroskedastisitas

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian kelima hipotesis dilakukan dengan perhitungan statistik menggunakan aplikasi SPSS, maka berikut ini adalah uraian analisis untuk perhitungan statistik tersebut.

a. Pengujian Hipotesis Secara Sendiri-Sendiri (*Parsial*)

Untuk melihat apakah variabel independen secara sendiri-sendiri (*parsial*) berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan uji t yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi t hitung dengan nilai alpha yang ditetapkan sebesar 0,05. Berikut ini disajikan hasil perhitungannya :

Tabel 5.1
Hasil Pengujian Secara Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.506	.115		-4.390	.000
	Proper Rank	.012	.021	.072	.559	.581
	ROA	.001	.001	.149	1.118	.275
	LEV	.001	.001	.054	.411	.684
	SIZE	.020	.004	.751	5.797	.000

a. Dependent Variable: CSDI

Berdasarkan tabel 5.1 di atas diketahui nilai konstanta sebesar -0,506 dan nilai koefisien regresi Proper Rank (X_1) sebesar 0,012, koefisien regresi ROA (X_2) sebesar 0,001, koefisien regresi LEV (X_3) sebesar 0,001 dan koefisien regresi Size (X_4) sebesar 0,020. Dari sini diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = -0,506 + 0,012 X_1 + 0,001 X_2 + 0,001 X_3 + 0,020X_4$$

Hal ini berarti bahwa:

1. Konstanta (a) = -0,506 artinya tanpa adanya variabel Proper Rank, ROA, LEV, dan SIZE maka nilai CSDI hanya sebesar -0,506.
2. Koefisien regresi Proper Rank (X_1) = 0,012 artinya apabila nilai Proper Rank meningkat sebesar 1 skor maka nilai CSDI akan meningkat sebesar 0,012 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
3. Koefisien regresi ROA (X_2) = 0,001 artinya apabila nilai ROA meningkat sebesar 1 skor maka nilai CSDI akan meningkat sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
4. Koefisien regresi LEV (X_3) = 0,001 artinya apabila nilai LEV meningkat sebesar 1 skor maka nilai CSDI akan meningkat sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
5. Kemudian Koefisien regresi SIZE (X_4) = 0,020 artinya apabila nilai SIZE meningkat sebesar 1 skor maka nilai CSDI akan meningkat sebesar 0,020 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Kemudian untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat untuk dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Proper Rank (X_1) Terhadap CSDI (Y)

Berdasarkan Tabel 5.1 diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel Proper Rank sebesar 0,581 atau lebih besar dari level signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel Proper Rank (X_1) tidak berpengaruh terhadap variabel CSDI (Y). Kemudian dari tabel di atas juga diperoleh nilai t hitung sebesar 0,559 lalu dibandingkan dengan nilai t tabel ($1/2$ 0,05 ; 25) sebesar 2,060. Kesimpulan, oleh karena t hitung $<$ t tabel maka hipotesis ditolak artinya variabel Proper Rank secara parsial tidak berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel CSDI.

2. Pengaruh ROA (X_2) Terhadap CSDI (Y)

Berdasarkan Tabel 5.1 diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel ROA sebesar 0,275 atau lebih besar dari level signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel ROA (X_2) tidak berpengaruh terhadap variabel CSDI (Y). Kemudian dari tabel di atas juga diperoleh nilai t hitung sebesar 1,118 lalu dibandingkan dengan nilai t tabel ($1/2$ 0,05 ; 25) sebesar 2,060. Kesimpulan, oleh karena t hitung $<$ t tabel maka hipotesis ditolak artinya variabel ROA secara parsial tidak berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap CSDI.

3. Pengaruh LEV (X_3) Terhadap CSDI (Y)

Berdasarkan Tabel 5.1 diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel LEV sebesar 0,684 atau lebih besar dari level signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel LEV (X_3) tidak berpengaruh terhadap variabel CSDI (Y). Kemudian dari tabel di atas juga diperoleh nilai t hitung sebesar 0,411 lalu dibandingkan dengan nilai t tabel ($1/2$ 0,05 ; 25) sebesar 2,060. Kesimpulan, oleh karena t hitung $<$ t tabel maka hipotesis ditolak artinya variabel LEV secara parsial tidak berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel CSDI.

4. Pengaruh SIZE (X_4) Terhadap CSDI (Y)

Berdasarkan Tabel 5.1 diperoleh nilai signifikansi t untuk variabel SIZE sebesar 0,000 atau lebih kecil dari level signifikansi 0,05. Hal ini berarti variabel SIZE (X_5) berpengaruh terhadap variabel CSDI (Y). Kemudian dari tabel di atas juga diperoleh nilai t hitung sebesar 5,797 lalu dibandingkan dengan nilai t tabel ($1/2$ 0,05 ; 25) sebesar 2,060.

Kesimpulan, oleh karena t hitung $>$ t tabel maka hipotesis diterima artinya variabel SIZE secara parsial berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap CSDI.

b. Pengujian Secara Bersama-sama (*Simultan*)

Untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi F hitung dengan nilai alpha yang ditetapkan sebesar 0,05. Berikut ini disajikan hasil perhitungannya:

Tabel 5.2
Hasil Pengujian Secara Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.178	5	.036	8.861	.000 ^a
	Residual	.096	24	.004		
	Total	.274	29			

a. Predictors: (Constant), SIZE, Proper Rank, LEV, ROA

b. Dependent Variable: CSDI

Berdasarkan hasil uji F atau F test diperoleh F hitung sebesar 8,861 kemudian dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,62. Oleh karena F hitung lebih besar dari F tabel maka diperoleh hasil secara simultan variabel Proper Rank (X_1), ROA (X_2), LEV (X_3), dan SIZE (X_4) berpengaruh terhadap CSDI (Y). Selanjutnya hal ini dapat pula dilakukan dengan melihat nilai probabilitas pada kolom sig. (signifikan) adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari level signifikansi 0,05. Hal ini berarti diperoleh hasil secara simultan variabel Proper Rank (X_1), ROA (X_2), LEV (X_3), dan SIZE (X_4) berpengaruh terhadap CSDI (Y).

c. Hasil Analisis Korelasi

Untuk melihat seberapa erat hubungan variabel *independent* terhadap variabel *dependent*, peneliti menggunakan uji koefisien korelasi (R). Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar variabel *independent* mempengaruhi *variable dependent* digunakan uji koefisien determinasi (R^2). Berikut diuraikan hasil analisis koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R^2):

Tabel 5.3
Hasil Uji Analisis Korelasi

Model Summary^p

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.649	.575	.06331

a. Predictors: (Constant), SIZE, Proper Rank, LEV, ROA

b. Dependent Variable: CSDI

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,805 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara variabel Proper Rank (X_1), ROA (X_2), LEV (X_3), dan SIZE (X_4) terhadap CSDI (Y). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,649 menunjukkan bahwa proporsi variasi variabel independen dalam model secara simultan mempengaruhi variabel dependen sebesar 64,9% dan sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Pembahasan

Dalam pengujian secara simultan, ditemukan bahwa variabel-variabel independen (Proper Rank, ROA, LEV, dan SIZE) hanya mampu mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 64,9%, sedangkan sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang digunakan. Hal ini menunjukkan perlu adanya penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain sebagai penduga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam pengujian secara parsial, hanya satu variabel saja yaitu SIZE yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan variabel-variabel lainnya (Proper Rank, ROA, dan LEV) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Bukti bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh SIZE (ukuran perusahaan) telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan *agency theory* yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Lang dan Lundholm (1993) yang menyatakan bahwa tingkat keluasan informasi dalam kebijakan pengungkapan perusahaan akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tuntutan publik akan informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang berukuran kecil. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan (SIZE) yang diproksi dengan total aktiva menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan maka semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kinerja lingkungan (PROPER Rank) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya kinerja lingkungan perusahaan tidak akan mempengaruhi keluasan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini nampak tidak sejalan dengan model *discretionary disclosure* menurut Verrecchia (1983) yang menyatakan bahwa pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan kinerja mereka berarti menggambarkan *good news* bagi pelaku pasar. Oleh karena itu, perusahaan dengan kinerja lingkungan (*environmental performance*) yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang lebih buruk. Suratno dkk. (2006) juga menyatakan bahwa *environmental performance* berpengaruh secara positif signifikan terhadap *environmental disclosure*.

Profitabilitas perusahaan (ROA) dalam penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda dengan hipotesis, dimana ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini tidak berhasil mendukung teori legitimasi, dimana menurut teori ini adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca "*good news*" kinerja perusahaan (misalnya dalam lingkup sosial) sehingga investor akan

tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Hasil ini mungkin sesuai dengan pendapat Kokubu et al. (2001) bahwa *political visibility* perusahaan tergantung pada ukurannya bukan pada profitabilitasnya.

Ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya tercermin dalam tingkat leverage. Dalam penelitian ini, leverage yang diproksi dengan rasio hutang terhadap modal sendiri menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini tidak mendukung teori keagenan yang memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Schipper (dalam Marwata, 2001) dan Meek, *et al.* (dalam Fitriany, 2001), tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Hasil ini mungkin sesuai dengan pendapat Kokubu et al. (2001) dalam penelitiannya di Jepang yang menyatakan bahwa perusahaan di Jepang secara tradisional mempunyai hubungan yang baik dengan bank, walaupun mempunyai suatu derajat ketergantungan yang tinggi terhadap hutang. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutang ini juga terjadi di Indonesia, dimana tanpa adanya hubungan yang baik dengan pihak *debtholders* maka hal ini akan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Dalam pengujian secara simultan ditemukan bahwa variabel-variabel independen (Proper Rank, ROA, LEV, dan SIZE) hanya mampu mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial (CSDI) sebesar 64,9%, sedangkan sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang digunakan.
2. Dalam pengujian secara parsial, hanya satu variabel saja yaitu SIZE yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan variabel-variabel lainnya (Proper Rank, ROA, dan LEV) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan :

1. Tingkat *R Square* yang tidak begitu besar dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan perlu adanya penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain sebagai penduga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas periode penelitian, dimana dalam penelitian ini hanya menggunakan satu periode pengamatan. Periode penelitian yang lebih panjang akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang lebih mendekati kondisi sebenarnya.
3. Item-item yang harus diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan belum diatur di Indonesia, sehingga untuk menghitung indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan masih mengacu pada aturan dari luar negeri. Oleh karena itu, Bapepam-LK perlu memikirkan adanya suatu aturan yang mengatur mengenai item-item pengungkapan tanggung jawab sosial yang harus dibuat perusahaan sesuai dengan sektor industrinya, sehingga pengungkapan tersebut

menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Dengan demikian perusahaan akan lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Tuwaijri, Sulaiman A., Christensen, T. E. and Hughes II, K. E. 2004. The Relations among Environmental Disclosure, Environmental Performance, and Economic Performance : A Simultaneous Equations Approach. *Accounting Organizations and Society* 29 : 447-471.
- Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan- Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang. Agustus 23-26, 2006.
- Belkaoui, A. and Karpik, P.G. 1989. Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 2 (1) : 36-51.
- Darwin, Ali. 2004. Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. *Konvensi Nasional Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan*. Yogyakarta, 13-15 Desember.
- Donovan, Gary and Kathy Gibson. 2000. Environmental Disclosure in the Corporate Annual Report : A Longitudinal Australian Study. *Paper for Presentation in the 6th Interdisciplinary Environmental Association Conference*, Montreal, Canada.
- Gray, R., Javad, M., Power, David M., and Sinclair C. Donald. 2001. Social and Environmental Disclosure, and Corporate Characteristic : A Research Note and Extension. *Journal of Business Finance and Accounting* 28 (3) :327-356.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Basic Econometrics*. 3rd ed. International Edition. McGraw- Hill.
- Hackston, David and Milne, Marcus J. 1996. Some Determinants Of Social And Environmental Disclosures In New Zealand Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 9 (1) : 77-108
- Harahap, Sofyan Safri. 1993. *Teori Akuntansi*. Edisi Kesatu, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Henny dan Murtanto. 2001. Analisis Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi* 1 (2) : 21-48
- Kumalahadi. 2000. Perspektif Pragmatik Lingkungan dan Sosial dalam Laporan Keuangan: Peningkatan Kegunaan dan Pertanggungjawaban. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 4 : 51-66
- Lindrianasari. 2007. Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia. *JAAI* 11 (2) : 159-172.
- Mathews, M.R. 1997. Twenty-Five Years Of Social And Environmental Accounting Researchis There A Silver Jubilee To Celebrate?. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 10 (4) : 487-531.

- Mirfazli, Edwin dan Nurdiono. 2007. Evaluasi Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan dalam Kelompok Aneka Industri yang Go Publik di BEJ. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 12 (1) : 1-11.
- Rakhiemah, Adilla Noor dan Agustia, Dian. 2009. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Palembang, November 4-6.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo, September 15-16.
- Suratno, Ignatius Bondan, dkk. 2006. Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang, Agustus, 23-26.
- Utomo, Muhammad Muslim. 2000. Praktek Pengungkapan Sosial pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi III* : 99-122.
- Zeghal, Daniel and Ahmed, Sadrudin A. 1990. Comparison of Social Responsibility Information Disclosure Media Used by Canadian Firms. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 3 (1) : 38-53.
- Zuhroh, Diana dan I Putu Pande Heri Sukmawati. 2003. Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi Investor (Studi Kasus pada Perusahaan-Perusahaan High Profile di BEJ). *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya, 16-17 Oktober.

LAMPIRAN

ITEM-ITEM PENGUNGKAPAN SOSIAL PERUSAHAAN (MENURUT GRI) :

ENVIRONMENT

1. Materials used by weight or volume
2. Percentage of materials used that are recycled input materials
3. Direct energy consumption by primary energy source
4. Indirect energy consumption by primary energy source
5. Energy saved due to conservation and efficiency improvements
6. Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy-based products and services, and reductions in energy requirements as a result of these initiatives
7. Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved
8. Total water withdrawal by source
9. Water sources significantly affected by withdrawal of water
10. Percentage and total volume of water recycled and reused
11. Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas
12. Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas
13. Habitats protected or restored
14. Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity
15. Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk
16. Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight
17. Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight
18. Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved
19. Emissions of ozone-depleting substances by weight
20. NO_x, SO_x, and other significant air emissions by type and weight
21. Total water discharge by quality and destination
22. Total weight of waste by type and disposal method
23. Total number and volume of significant spills

24. Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally
25. Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by the reporting organization's discharges of water and runoff
26. Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impacts mitigation
27. Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category
28. Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations
29. Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization's operations, and transporting members of the workforce
30. Total environmental protection expenditures and investments by type.

ECONOMIC

31. Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments
32. Financial implications and other risks and opportunities for the organization's activities due to climate change
33. Coverage of the organization's defined benefit plan obligations
34. Significant financial assistance received from government
35. Range of ratios of standard entry level wage compared to local minimum wage at significant locations of operation.
36. Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations of operation.
37. Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community at significant locations of operation
38. Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through commercial, in-kind, or pro bono engagement

39. Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.

HUMAN RIGHTS

40. Percentage and total number of significant investment agreements that include human rights clauses or that have undergone human rights screening
41. Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening on human rights and actions taken
42. Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained
43. Total number of incidents of discrimination and actions taken
44. Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these rights
45. Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the elimination of child labor
46. Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures taken to contribute to the elimination of forced or compulsory labor
47. Percentage of security personnel trained in the organization's policies or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations
48. Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken.

LABOR PRACTICES & DECENT WORK

49. Total workforce by employment type, employment contract, and region
50. Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region
51. Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations
52. percentage of employees covered by collective bargaining agreements

53. Minimum notice period(s) regarding significant operational changes, including whether it is specified in collective agreements
54. Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs
55. Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total number of work-related fatalities by region
56. Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their families, or community members regarding serious diseases
57. Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions. Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions
58. Average hours of training per year per employee by employee category
59. Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings
60. Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews
61. Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity
62. Ratio of basic salary of men to women by employee category.

PRODUCT RESPONSIBILITY

63. Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such procedures
64. Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety impacts of products and services, by type of outcomes
65. Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products and services subject to such information requirements

66. Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomes
67. Practices related to customer satisfaction, including results of surveys measuring customer satisfaction
68. Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship
69. Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes
70. Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data
71. Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services.

SOCIETY

72. Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting
73. Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption
74. Percentage of employees trained in organization's anti-corruption policies and procedures
75. Actions taken in response to incidents of corruptions
76. Public policy positions and participation in public policy development and lobbying
77. Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related institutions by country
78. Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes
79. Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with laws and regulations.